

Ganjil Genap di Kota Bogor Kini Hanya Berlaku dari Jumat hingga Minggu

BOGOR (IM) - Pemberlakuan sistem ganjil genap berdasarkan pelat nomor kendaraan di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dilonggarkan seiring menurunnya tren kasus positif Covid-19 di wilayah tersebut.

Untuk saat ini, sistem ganjil genap di Kota Bogor masih tetap diberlakukan, namun hanya di waktu dan jam tertentu. Kondisi itu berbeda jauh ketika Kota Bogor masih berada di level 4 masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Paur Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Rahmat Gumilar mengatakan, saat ini sistem ganjil genap di Kota Bogor hanya dilakukan di akhir pekan saja, mulai Jumat hingga Minggu.

Waktu pelaksanaannya pun, sambung Rahmat, dilakukan dengan jam yang tidak ditentukan melihat dari situasi di lapangan.

"Jadi ganjil genap hanya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu

saja. Tapi jam atau waktunya nggak bisa dipastikan, ikutin kondisi di lapangan. Jadi kalau di jam-jam tertentu ada kepadatan, baru kita berlakukan ganjil genap," kata Rahmat, Rabu (29/9).

Rahmat menambahkan, tujuan dari pemberlakuan sistem ganjil genap di Kota Bogor adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga angka kasus Covid-19 bisa ditekan.

Selama pemberlakuan ganjil genap di masa PPKM darurat, sambung Rahmat, kebijakan itu dinilai mampu mengurangi mobilitas masyarakat baik yang berasal dari dalam dan luar Kota Bogor.

"Intinya kan ganjil genap ini untuk membatasi. Dari yang tadinya melarang karena penyesatan selama PPKM kemarin, sekarang kita ubah jadi mengatur," sebut Rahmat.

"Jadi masyarakat masih bisa beraktifitas dengan menyesuaikan nomor pelat kendaraan," pungkasnya. ● **gio**

Pemkot Bogor Dorong UMKM Tingkatkan Kapasitas Platform Digital

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor mendorong pelaku usaha menengah kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas diri mereka pada platform digital untuk memperluas pemasaran produk melalui pasar digital.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Samson Purba saat dihubungi di Kota Bogor, Rabu (29/9) mengatakan pada era digitalisasi, pelaku UMKM, mau tidak mau harus memiliki pengetahuan dan keterampilan pada platform digital.

Salah satu upaya instansinya dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM terhadap platform digital, katanya, adalah melaksanakan pelatihan Teknis Substantif Bagi UMKM se-Kota Bogor, di Kota Bogor, pada 28-30 September 2021. Pelatihan tersebut merupakan program dari Diskop dan UKM Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, diikuti oleh 25 pelaku UMKM di Kota Bogor.

Menurut Samson, para pelaku UMKM dilatih bagaimana cara mengemas produk, membuat foto produk untuk promosi, serta cara mempromosikan produknya melalui pasar digital, baik toko

online, media sosial, dan lainnya. "Produk UMKM harus lebih menarik perhatian calon pembeli," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyatakan, UMKM dapat menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang berperan penting untuk menguatkan fondasi ekonomi rakyat. "Pada saat terjadi krisis 1998 lalu, UMKM terbukti mampu bertahan," katanya saat membuka kegiatan pelatihan tersebut di Kota Bogor pada Selasa (28/9).

Atang menuturkan para pelaku UMKM harus dibekali dengan meningkatkan kapasitasnya agar memiliki pengetahuan digital sehingga dapat memasarkan produknya pada pasar digital yang pangsaannya lebih luas. "Kemampuan yang menarik ini sangat penting, karena menjadi pertimbangan bagi calon pembeli dalam memutuskan untuk membeli atau tidak," katanya.

Atang juga menyampaikan pesan agar pelaku UMKM saling berkolaborasi dan menjaga kepercayaan konsumen. "Kolaborasi dan kepercayaan konsumen itu sangat penting, agar produknya bisa bertahan," katanya. ● **gio**



PAMERAN GELAR PRODUK UMKM

Pengunjung melihat produk unggulan saat Pameran Gelar Produk UMKM di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (29/9). Kegiatan tersebut untuk mendorong kreativitas dan inovasi UMKM dalam upaya mengangkat daya tawar produk ke posisi yang lebih baik di masa pandemi Covid-19.

Pemkot Bandung Kaji Wacana Izin Konser Musik

BANDUNG (IM) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung sedang melakukan kajian terkait wacana tentang pelonggaran kegiatan musik seperti konser skala besar. Namun, mereka menegaskan meski kasus Covid-19 sedang landai tidak serta merta konser musik akan diizinkan.

"Mau ditelaah dulu, nanti siang telahannya disampaikan kepada Pak Sekda untuk bahan beliau ratas (rapat terbatas) hari Jumat," ujar Kepala Disbudpar Kota Bandung, Dewi Kania Sari di Balai Kota Bandung, Rabu (29/9).

Meski kasus Covid-19 sedang melandai di Kota Bandung, dia menegaskan tidak serta merta kegiatan konser musik skala besar akan diperbolehkan. Apalagi, perempuan yang akrab disapa Kenny ini mengaku rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum tertuang resmi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.

Dia justru mengingatkan masyarakat bahwa di tengah kasus Covid-19 yang melandai harus tetap waspada. Pihaknya mengatakan penindakan dilakukan langsung oleh petugas Satpol PP. ● **pur**

Covid-19 kembali. "Makanya itu kami tetap harus waspada justru saat landai (kasus) ini kita harus kewaspadaan terus dijaga bukan malah jadi euforia," ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kebijakannya. Sehingga, Kenny mengatakan tidak harus sama persis dengan aturan dari pusat.

"Tidak serta merta kan aturan detail terserah pemerintah daerah masing-masing. Tidak harus membebek langsung," kata dia.

Kenny menyebut, sejauh ini tempat hiburan malam masih dilarang beroperasi. Namun, masih ditemukan sejumlah tempat hiburan malam yang memaksa buka sehingga diberikan sanksi. Beberapa sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis, lisan dan penindakan yang langsung dilakukan Satpol PP Kota Bandung.

"Laporan ke saya ada 10 ke bawah. Pelanggaran membuka itu pelanggaran kan belum boleh," katanya. Dia mengatakan penindakan dilakukan langsung oleh petugas Satpol PP. ● **pur**

8 | Nusantara



PUAN MAHARANI TINJAU VAKSINASI PELAJAR DI BOGOR

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan pelajar saat meninjau vaksinasi Covid-19 pelajar di SMKN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/9). Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bagi pelajar tersebut, menasar 3.500 pelajar di kawasan Cibinong Kabupaten Bogor.

Awasi Uji Coba PTM, Pemkot Bogor Bentuk Satgas Covid-19 Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi mengatakan tanggung jawab pelaksanaan uji coba PTM yang akan dilaksanakan oleh 44 SMP Negeri dan Swasta, dari 50 SMP yang mengajukan PTM, memang perlu kerja sama semua pihak, agar tidak ada yang kecolongan, baik kesehatan maupun keamanan pelajar.

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk Satgas Covid-19 Sekolah yang melibatkan OSIS dalam mengawasi kepatuhan protokol kesehatan pelajar saat pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan mulai digelar pada Senin

(4/10). "Melibatkan OSIS yang akan direkrut ke dalam Satgas Covid-19 Sekolah untuk melakukan pengawasan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di SMPN 5 Kota Bogor, Rabu (29/9). Menurutnya, perlu kerja

sama semua pihak termasuk pelajar, bukan hanya Dinas Pendidikan, kepolisian dan guru yang patut mengawasi jalannya PTM di masa PPKM level 3 ini.

Bima terkesan dengan usulan siswa-siswi SMPN 5 yang diajaknya dialog secara daring dalam kunjungan ke sekolah tersebut. Siswa-siswi antusias mengajukan diri turut membantu menjaga protokol kesehatan.

Dengan begitu, Pemerintah Bogor akan mengawasi ketat protokol kesehatan melalui kerja sama dengan pihak sekolah untuk mengerahkan anggota OSIS dalam mengingatkan teman-temannya.

Selain itu tugas Satgas Covid-19 Sekolah bersama pihak guru dan petugas lainnya, juga menekankan surveilans atau

pengamatan yang sistematis dan terus-menerus sebagai mitigasi kasus penyebaran Covid-19 yang bisa saja terjadi saat PTM. Contohnya, ketika ditemukan pelajar yang tidak masuk sekolah maka harus segera bergerak melakukan survei dan koordinasi untuk mengetahui alasannya.

Jika ternyata terpapar Covid-19, Satgas akan melakukan penelusuran dan tindakan supaya tidak terjadi kluster baru. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi mengatakan tanggung jawab pelaksanaan uji coba PTM yang akan dilaksanakan

oleh 44 SMP Negeri dan Swasta, dari 50 SMP yang mengajukan PTM, memang perlu kerja sama semua pihak, agar tidak ada yang kecolongan, baik kesehatan maupun keamanan pelajar.

Hanafi menekankan agar pihak sekolah dan pelajar dapat melaksanakan pesan-pesan penegakan protokol kesehatan dari Pemerintah Kota Bogor dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

"Semoga harapan Pak Wali tidak hanya dilaksanakan sekolah sekadar awal dilaksanakannya PTM, tapi seterusnya juga," tutupnya. ● **pur**

Pemkab Bogor Raih Penghargaan APE



BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama pada tahun 2021, Selasa (28/9).

Penghargaan APE diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, atas komitmen pemerintah daerah yang telah mewujudkan dan merealisasikan pengarusutamaan gender.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selaku penyelenggara kegiatan evaluasi pengarusutamaan gender, yang telah menganugerahi Pemkab Bogor sebagai pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

"Tahun ini Kabupaten Bogor kembali meraih 'predikat utama' Anugerah Parahita Ekapraya. Keberhasilan ini merupakan buah kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen, terutama Tim Pokja dan Tim Driver Pengarusutamaan Gender serta seluruh perangkat daerah juga seluruh lapisan masyarakat," ungkap Ade Yasin.

Ade menjelaskan, pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, yaitu mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan, anak, difabel dan lansia, bertujuan lintas sektoral, pemecahan masalah kesulitan ekonomi perempuan, penurunan angka trafficking, perlindungan kekerasan pada

perempuan dan anak serta keterlibatan perempuan dalam politik.

"Berbagai upaya inovasi telah dilakukan termasuk dalam bidang pengarusutamaan gender, menjadikan Kabupaten Bogor mampu meraih peringkat ketiga sebagai kabupaten inovatif tahun 2020 dalam Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri," ujar Ade.

Di antaranya, lanjut Ade adalah, Sistem Pengaduan dan Informasi Gender secara online atau Sigadis, Sistem Informasi Jejaring Penyelamatan Ibu, Neonatal, dan Anak (Sijari Bunda), Layanan Peluk Samawa yakni pelayanan langsung kepedudukan sapa dan melayani warga jemput bola one day service ke desa-desa melalui penyelesaian dokumen 2 in 1 (akte kelahiran dan KIA) satu hari jadi, Layanan Neng Titu Sehat, pelayanan dokumen 3 in 1 berupa pendaftaran Akta Kelahiran, KIA dan KK bagi 4 RSUD (Cibinong, Ciawi, Leuwiliang dan Cileungsi), serta program pengembangan pelayanan obstetri-neonatal emergensi dasar pada 29 Puskesmas Poned. Selanjutnya Satu milyar satu desa (Samsided) untuk pemerataan infrastruktur, dan lain sebagainya.

"Adapun strategi lainnya yang diterapkan oleh Pemkab Bogor adalah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menganalisa sejauh mana pengintegrasian gender ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah," kata Ade.

Ia menyebutkan, hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mendorong pembangunan manusia menjadi lebih baik dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bogor. ● **gio**

3 Pasar di Kota Bogor akan Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

BOGOR (IM) - Kota Bogor akan menerapkan protokol kesehatan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di pasar tradisional di Pasar Plaza Bogor, Pasar Blok A dan B, serta Pasar Blok F dan G.

Dia menuturkan, persiapan yang tengah dilakukan yakni melakukan vaksinasi terhadap para pedagang di pasar. Kemudian, menunggu barcode aplikasi PeduliLindungi dari pemerintah pusat.

"Kami masih persiapan. Nanti uji coba di tiga pasar dulu. Tiga pasar itu dipilih karena lebih gampang untuk akses masuk dan keluar," katanya, Rabu (29/9).

Selain itu, lanjutnya, dia meminta kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan kelonggaran, termasuk sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Muzakkir mengaku akan segera melakukan sosialisasi terutama pada para pedagang.

Dia menyebutkan, meski penerapan kebijakan itu memang bertujuan untuk memastikan rasa aman dan nyaman di pasar tradisional, ada permasalahan lain yang harus diperhatikan. Di antaranya, pengunjung pasar dan pedagang pasar belum tentu memiliki gawai atau handphone bersistem smartphone.

"Handphone-nya masih jadul, ini harus jadi pertimbangan. Kita berikan edukasi, besok-besok ke pasar bawa ya," ucapnya.

Sehingga, meski nantinya protokol kesehatan dengan

aplikasi PeduliLindungi diterapkan, Muzakkir mengatakan, pihaknya tidak menerapkan cara yang sama dengan mal. Berbeda dengan mal, jika ada pengunjung maupun pedagang yang hendak masuk pasar belum divaksinasi, petugas masih mengizinkan mereka masuk. Hanya saja, yang bersangkutan akan diarahkan untuk divaksinasi.

"Caranya beda dengan mal. Tunjukkan kartu vaksin, kita bolehkan masuk. Kalau belum vaksin boleh masuk, tapi kita data dan kita arahkan untuk vaksin," tuturnya.

Dia menambahkan, dari total 9.000 pedagang yang berada di bawah Perumda PJJ, sekitar 85 persen di antaranya sudah divaksinasi Covid-19. Saat ini, pihaknya pun terus mengencarkan vaksinasi terhadap para pedagang. Agar roda ekonomi di pasar terus berjalan. ● **gio**



JEMBATAN LENGKUNG PERTAMA DI INDONESIA

Sejumlah pengendara motor melintas di bawah Jembatan Sungai Alalak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (29/9/2021). Jembatan Sungai Alalak yang merupakan jembatan lengkung pertama di Indonesia telah selesai seluruh proses pembangunannya pada Jumat (24/9) lalu dan mulai dibuka untuk di uji coba operasional secara terbatas sekaligus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kalsel.